

Bamsuet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Disertasi Banjir Pujian

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak atas keberhasilannya meraih gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung dengan predikat cumlaude.

Hal itu diungkapkan usai dinyatakan lulus Sidang Promosi Terbuka Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (28/1).

Adapun pihak yang mendukung taranya, Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana

TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo, serta berbagai tokoh lainnya.

“Dukungan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, dan berbagai pihak lainnya terkait kajian tentang PPHN dalam disertasi ini menjadi angin segar agar bangsa Indonesia bisa segera mendirikan PPHN tanpa melalui amandemen, melainkan dengan konvensi ketatanegaraan delapan lembaga tinggi negara,” kata Bamsuet dalam keterangan, Minggu (29/1).

“Sehingga berbagai program pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo seperti pembangunan IKN Nusantara, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, serta pembangunan dan penyempurnaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, bisa tetap dilanjutkan oleh siapapun presiden penggantinya,” katanya. ● han

Erick Thohir Digadag sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengklaim, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi kandidat terkuat calon wakil presiden yang didukung partainya.

Klaim tersebut dilontarkan Yandri selepas membuka Silaturahmi Akbar Mathlaul Anwar di Gedung MPR RI, Minggu (29/1).

Erick Thohir diapresiasi memberi sambutan di antara sederet kader PAN seperti Yandri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan beberapa kader lain.

“Kalau Bang Zul (Zulkifli Hasan) tentu semua mendukung ya (sebagai capres). Tapi di luar ketua umum, untuk posisi cawapres, saya kira Bang Erick Thohir terkuat sekarang di internal partai,” kata Yandri kepada wartawan.

Ia bahkan mengklaim hubungan partainya dengan Erick sudah ibarat dua sisi mata uang.

“Tidak aneh kalau misalkan Bang Erick Thohir dan PAN itu seperti dua sisi mata uang, kira-kira begitu,” ujar Yandri.

“Menurut saya, Bang Erick dengan PAN itu tidak ada jarak ya. Sudah luar dalam sangat nyambung chemistry-nya,” katanya menambahkan.

Bahkan menurut Yandri, di antara menteri-menteri Presiden Joko Widodo, Erick adalah menteri yang paling dekat dengan PAN, sehingga tak heran bila salah satu calon Ketua Umum PSSI tersebut kerap datang atau diundang ke hajatan PAN.

“Di samping memang Bang Erick dan Bang Zul lama hubungannya, dengan sesama Lampung, kekeluargaan Lampung,” kata Yandri.

Meskipun demikian, Yandri menyebut belum ada komunikasi resmi agar Erick merapat ke PAN sebagai kader. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MENHAN PRABOWO HADIRI LAUNCHING PBN DI MEDAN BELAWAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri acara Launching Pemuda Bela Negara (PBN) di Medan Belawan, Sumatera Utara, Sabtu (28/1). Program PBN diinisiasi oleh Pemerintah Kota Medan dan Kodim 0201/Medan tersebut bertujuan untuk membina perilaku dan mental generasi muda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Aparat Penegak Hukum, ICW: Kemunduran

Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang meminta aparat penegak hukum tak selidiki kepala daerah, dikhawatirkan akan diikuti kepolisian di daerah.

JAKARTA (IM) - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian agar penegak hukum mendampingi dan tidak menyelidiki atau memanggil kepala daerah, sebagai sebuah kemunduran.

“Menurut saya usul ini tidak perlu diundahkan karena justru langkah mundur,” kata Agus dalam keterangannya saat dihubungi wartawan, Minggu (29/1).

Alasan Tito supaya aparat penegak hukum mendampingi kepala daerah dalam menjalankan programnya tidak tepat. “Kalau butuh pendampingan kan sudah ada BPKP (Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan). Enggak usah lagi penegak hukum,” ucap Agus.

Agus juga mengingatkan Mahkamah Konstitusi juga sudah menghapus pasal dalam undang-undang yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin kepada presiden sebelum memanggil kepala daerah.

Usulan Tito yang dinilai tidak relevan bisa menuai penolakan dari masyarakat. Agus menyatakan, seorang kepala daerah yang merupakan pejabat publik memang wajib taat kepada aturan.

“Segala laporan sesuai standar yang ditetapkan. Kalau tidak mau ambil resiko jangan jadi pejabat publik lah. Karena mereka memegang

amanat kepercayaan rakyat,” ucap Agus.

Agus justru khawatir pernyataan Tito justru diikuti oleh para kepala kepolisian di daerah.

“Pak Tito harus hati-hati dalam membuat usulan karena dia senior polisi dan mantan Kapolri, jadi khawatir kemudian diamini kepolisian di daerah,” papar Agus.

Dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan beserta kepala daerah 24 kabupaten di Sulsel pada Jumat (27/1) lalu, Tito kembali menegaskan alasan di balik usulan supaya aparat penegak hukum tidak menyelidiki dan memanggil kepala daerah. Menurut Tito, pernyataannya didasari oleh banyaknya laporan yang diterima dari kepala daerah. Di mana, kepala daerah sementara menjalankan program kerjanya namun sudah diproses aparat penegak hukum (APH).

“Banyak kepala daerah keluhkan pemanggilan APH

saat menjalankan program. Program sementara berjalan, namun sudah dipanggil karena hanya adanya laporan. Tentunya, kepala daerah berpikir atau ketakutan menjalankan programnya,” kata Tito.

Tidak jalannya program kerja kepala daerah, lanjut Tito, berdampak pada serapan belanja daerah. Kurangnya serapan belanja daerah tentu berdampak kerugian besar kepada masyarakat.

“Program kerja masih berjalan, tentu belum selesai dan tentunya belum ada hasil audit ataupun kerugian negara. Ini APH sudah me-

ganggil kepala daerah hanya berdasarkan laporan yang diterimanya,” ujarnya.

Laporan yang diterima APH, ungkap Tito, dinilai politis. Di mana laporan-laporan yang diterima kebanyakan berasal dari laporan lawan politik kepala daerah tersebut.

“Jangan sampai ketakutan kepala daerah untuk kepada APH karena dipanggil, dipanggil, lidik (penyelidikan), dipanggil, lidik, moril akan jatuh. Harusnya, APH menjadi pendamping kepala daerah dalam menjalankan program kerja untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. ● han

Jaksa yang Tahan Tangis Saat Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir Seniornya

JAKARTA (IM) - Jaksa senior Jasman Mangandar Pandjaitan menyindir jaksa penuntut umum (JPU) yang menahan tangis saat membacakan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa Bharada Richard Eliezer atau Bharada E.

Menurut mantan Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut, hal tersebut tidak biasa dilakukan oleh jaksa yang bertugas. “Enggak (biasa). Itu menunjukkan jaksa seperti ini, jaksa apa... Di percintaan yang seperti itu. Masa... Jaksa itu (harusnya) berintegritas, profesional, berani,” ujar Djasmann dalam program Rosi, seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Minggu (29/1).

Djasmann mengatakan, kejadian jaksa menahan tangis dan bahkan dikuatkan oleh jaksa lainnya itu menjadi perbincangan. Dia heran apa yang ada di pikiran jaksa ketika menangis membaca tuntutan Bharada E, di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Susah saja mengatakan itu (yang bisa membuat jaksa menangis). Karena saya jarang nangis, saya orangnya keras. Jadi saya sulit membayangkan, ada apa di benak jaksa ini? Kok sampai dia mau menitikkan air mata,” tuturnya.

Menurut Djasmann, tidak ada jaksa yang menangis ketika membaca tuntutan dari seorang terdakwa di dalam persidangan. Djasmann lantas mendorong agar jaksa yang menangis itu untuk diperiksa.

“Masa membaca tuntutan kok jadi nangis. Itupun perlu pertanyaan. Kalau zaman dulu, periksa. Periksa itu jaksa-jaksa yang tidak profesional tadi,” kata Djasmann.

“Jadi jaksa-jaksa ini karena mendengarkan suara publik seperti ini, seharusnya dipanggil itu oleh Jampidom, ‘kenapa kamu? Kamu? Kamu?’,” katanya.

Djasmann mengakui bahwa di setiap tuntutan biasanya ada intervensi dari atasannya. Dia menyebut keputusan tuntutan hukuman terhadap seorang terdakwa kerap tidak hanya berdasarkan independensi jaksa yang bertugas saja, melainkan dari atasannya di Kejagung. Akan tetapi, Djasmann mengingatkan bahwa jaksa yang bertugas di persidangan boleh mundur jika tuntutan yang disepakati tidak sesuai dengan hati nuraninya.

“Di dalam dong dia ngomong, ‘maaf saya berbeda pendapat. Saya mundur’. Loh kenapa tidak ngomong saja mundur, ‘saya enggak sanggup melanjutkan ini kalau begini’, kalau misalnya dia diintervensi,” imbuh Djasmann.

Sikap JPU menjadi sorotan publik saat membacakan tuntutan 12 tahun penjara untuk terdakwa Richard Eliezer alias Bhara E. Jaksa Paris Manalu, sempat terdiam mengatur napas sebelum mengucapkan kalimat tuntutan untuk tBhara E.

Di saat bersamaan, Jaksa Sugeng Hariadi terlihat menguatkan Jaksa Paris Manalu dengan menepuk punggung Paris Manalu sambil membuang pandang. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar tetap ditahan dipotong masa penangkapan,” ucap Jaksa Paris Manalu.

Kalimat 12 tahun yang terdengar, seketika memicu riuh ruang sidang, pengunjungan dan dukungan Terdakwa Richard Eliezer histeris. ● han

FOTO: ANT



KIRAB KEBANGSAAN ANTARUMAT BERAGAMA Peserta membawa lambang negara Garuda Pancasila saat Kirab Kebangsaan di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (29/1). Kegiatan yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh berbagai kalangan tersebut sebagai upaya mempererat kerukunan antarumat beragama.

Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mundur ...

JAKARTA (IM) - Guruh Tirta Lunggana, putra almarhum Abraham Lunggana atau yang lebih populer dipanggil Haji Lulung, mengaku telah mengundurkan diri sebagai pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta.

Hal itu menyusul pencopotannya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

“Saya sudah mengundurkan diri menjadi pengurus,” ujar Tirta ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1).

Berdasarkan Surat Keterangan (SK) DPP PPP Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023, Tirta saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta. Namun, Tirta mengatakan telah mengajukan pengunduran diri pada 23 Januari 2023. Meskipun, permohonannya belum dijawab oleh DPP PPP.

“Kami mengundurkan diri dari pengurus DKI Jakarta bersama 5 DPC, Jakpus, Jakbar, Pulau Seribu, Jakut, Jaksel. Seperti itu ya,” katanya.

Tirta mengaku pengunduran diri itu dilakukan karena tak terima atas kebijakan DPP PPP yang menggantinya dan sejumlah pengurus lain.

“Menurut saya, itu sangat menyakitkan. Bahwa itu ada penggantian dari majelis syariah itu ada ulama, Habib itu diganti, dan tidak ada komunikasi,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa Mardiono tak hanya mengganti jabatan Tirta, tetapi juga merombak struktur di internal Majelis Syariah DPW PPP DKI Jakarta. Beberapa ulama yang dirombak adalah Munawir Aseli, Mahfud Asirun, Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Abdul Aziz, serta Najmi Mumtaza Rabbany. ● mei

Mentan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi, NasDem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

JAKARTA (IM) - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim ogah menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menuding Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, salah memberikan data ekspor-impor beras pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau urusan nyinyir itu biar urusan Hasto, jangan kita,” ujar Taslim ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1).

Ia mengungkapkan, NasDem tidak punya urusan dengan Hasto. Sebab, NasDem punya hubungan dan tanggung jawab dengan Jokowi.

“Kita sama sekali tidak terganggu sama hal seperti itu. Karena komitmen kita sama presiden yang kita pilih, tidak

sama yang lain,” katanya.

Ia juga mengomentari pernyataan Hasto soal pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1). Taslim mengatakan, pertemuan keduanya biasa terjadi antara Presiden dan Ketua Umum partai politik (parpol).

Taslim tak mau komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketum Nasdem, Surya Paloh, dihubungkan dengan berbagai isu lain.

“Jadi pertemuan Pak Surya dengan Jokowi enggak bisa diintervensi oleh siapa pun. Apalagi, orang sekelas Hasto,” ujar Taslim.

Hasto sebelumnya mengatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo memberikan data yang salah pada Jokowi. Menurutnya, hal ini contoh

tindakan politik yang gelap.

“Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu, ada yang memanfaatkan untuk impor,” kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Hasto mengaku khawatir bahwa data yang salah itu bakal berimbas pada publik. “Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton,” ujar Hasto.

“Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah. Padahal, presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah,” katanya lagi. ● han



APEL AKBAR SATU ABAD NU DI DEPOK

Sejumlah simpatisan Nahdlatul Ulama (NU) menyanyikan lagu Ya Lal Wathon saat mengikuti apel akbar satu abad NU di Depok, Jawa Barat, Minggu (29/1). Kegiatan yang dihadiri ribuan simpatisan tersebut untuk menyemarakkan peringatan satu abad lahirnya NU pada 31 Januari 2023 mendatang.

FOTO: ANT

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ALMEGA ALAM SEMESTA, tanggal 12 Januari 2023 No.10, dibuat dihadapan MOHAMMAD TOYIB, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Bekasi, bahwa pemegang saham PT. ALMEGA ALAM SEMESTA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang telah menyetujui menurunkan modal dasar & modal ditempatkan/modul disetor perseroan menjadi Rp. 7.000.000.000,-. Bilamana ada pihak-pihak yang berkeberatan agar menyampaikan secara tertulis kepada Direksi perseroan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.
Tangerang, 12 Januari 2023
PT. ALMEGA ALAM SEMESTA
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. TRANS UTAMA INDOKARYA, tanggal 26 Januari 2023 No.13, dibuat dihadapan MOHAMMAD TOYIB, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Bekasi, bahwa PT. TRANS UTAMA INDOKARYA, berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut telah dibubarkan. Kepada para kreditor dan debitor diminta mengadakan perhitungan kepada Direksi selaku likuidator perseroan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perseroan dibubarkan.
Jakarta, 30 Januari 2023
PT. TRANS UTAMA INDOKARYA
Dalam Likuidasi